

**PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGIK
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DI KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

HARDIYANTI SRI NINGSI

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 05027 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGIK
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DI KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun Dan Diajukan Oleh
HARDIYANTI SRI NINGSI
Nomor Stambuk : 10561 05027 14

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pengaruh Penerapan Manajemen Strategi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai**

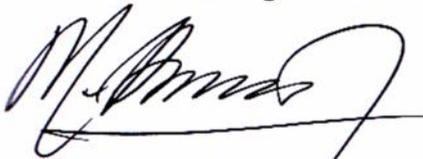
Nama Mahasiswa : **HARDIYANTI SRI NINGSI**

NIM : 10561 05027 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Mappamiring, M.Si.

Pembimbing II



Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M.Si.

Mengetahui

Dekan



Makassar

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



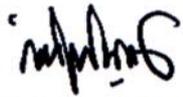
Nasrulhaq, S. Sos., MPA.

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1595/FSP/A.I-VIII/X/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Jumat, 05 Oktober 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M. Si

Penguji

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (ketua)
2. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
4. Nasrul Haq, S.Sos., M.PA



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama Mahasiswa : Hardiyanti Sri Ningsi

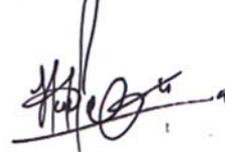
Nomor Stambuk : 10561 05027 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau lebih ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 07 September 2018

Yang menyatakan,



Hardiyanti Sri Ningsi

ABSTRAK

HARDIYANTI SRI NINGSI, Pengaruh Penerapan Manajemen Strategi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai (dibimbing oleh Mappamiring dan Hafiz Elfiansya Parawu).

Penerapan manajemen strategi merupakan salah satu variabel yang menentukan pencapaian tujuan suatu organisasi dan sangat terkait langsung dengan pembangunan daerah dalam proses keberhasilan suatu pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan pengaruh penerapan manajemen strategi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan menjelaskan hubungan dan anggota sampelnya sebanyak 50 orang pegawai yang dipilih secara *Simple Random Sampling* dari 100 anggota populasi. Teknik pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis secara statistik deskriptif dan regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS versi 23.0.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh langsung penerapan manajemen strategi terhadap pembangunan daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai. Hal ini dikuatkan dari hasil uji regresi dapat dilihat pengaruh variabel bebas (penerapan manajemen strategi) terhadap variabel terikat (pembangunan daerah) adalah sebesar 78,14% sedangkan sisahnya dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci : pengaruh penerapan manajemen strategi terhadap pembangunan daerah

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Manajemen Strategi Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelas sarjana Ilmu Administrasi Negara. Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Mappamiring, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, ST., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Nasrulhaq, S.Sos., MPA selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kedua orang tua dan segenap keluarga serta teman-teman yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 07 September 2018



Hardiyanti Sri Ningsi

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen Strategik	8
B. Konsep Pembangunan Daerah	11
C. Pengaruh Penerapan Manajemen Strategik terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah	17
D. Kerangka Pikir	18
E. Definisi Operasional	19
F. Hipotesis	21

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	23
B. Jenis Penelitian	23
C. Populasi dan Sampel.....	23
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Teknik Analisis Data	26

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	28
B. Pengumpulan Data.....	58
C. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kuantitatif Penerapan Manajemen Strategi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	60
D. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kuantitatif Pembangunan Daerah Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	68

E. Hasil Regresi Linear Sederhana Pengaru Penerapan Manajemen Strategi Terhadap Pembangunan Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	74
---	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kriteria Jawaban Responden	27
Tabel 4.1. Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	59
Tabel 4.2. Jumlah Responden Berdasarkan Status Kepegawaian	60
Tabel 4.3. Jumlah Responden Berdasarkan Golongan	60
Tabel 4.4 Pernyataan Responden Terhadap Indikator <i>Environmental Scanning</i> (Analisis Lingkungan)	62
Tabel 4.5 Pernyataan Responden Terhadap Indikator <i>Strategy Formulation</i> (Formulasi Strategi)	63
Tabel 4.6 Pernyataan Responden Terhadap Indikator <i>Strategy</i> <i>Implementation</i> (Implementasi Startegi)	65
Tabel 4.7 Pernyataan Responden Terhadap Indikator <i>Evaluation and Control</i> (Evaluasi dan Kontrol)	66
Tabel 4.8 Hasil Kumulatif Pernyataan Responden Terhadap 4 (Empat) Indikator Penerapan Manajemen Strategi	68
Tabel 4.9 Pernyataan Responden Terhadap Indikator Struktur Ekonomi	70
Tabel 4.10 Pernyataan Responden Terhadap Indikator Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia)	72
Tabel 4.11 Hasil Kumulatif Pernyataan Responden Terhadap 2 (Dua) Indikator Pembangunan Daerah	74
Tabel 4.12 <i>Variables Entered/Removed</i>	75
Tabel 4.13 Model <i>Summary</i>	75
Tabel 4.14 <i>Anova</i> ^a	76
Tabel 4.15 <i>Coefficients</i> ^a	76
Tabel 4.16 <i>Coefficients</i> ^a x1.1 terhadap Y	77
Tabel 4.17 <i>Coefficients</i> ^a x1.2 terhadap Y.....	77
Tabel 4.18 <i>Coefficients</i> ^a x1.3 terhadap Y	78
Tabel 4.19 <i>Coefficients</i> ^a x1.4 terhadap Y	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	19
---------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: (1) Bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah Negara.

Kajian manajemen strategik dalam organisasi-organisasi publik memiliki ciri-ciri perilaku serta spesifikasi yang natural dan khas dikenali sebagai milik organisasi publik. Manajemen strategik dapat memberi peluang kepada organisasi untuk menemukan jawaban atas tantangan strategis dalam suatu lingkungan yang tidak jelas serta sulit diprediksikan, dimana organisasi-organisasi tersebut akan berlabuh dihari ini maupun di masa yang akan datang. Penerapan sistem manajemen strategik menjadi sangat memudahkan organisasi publik untuk mengarahkan segenap aktivitas, penciptaan dan pendistribusian nilai-nilainya. Menurut Houthoofd (2001) dalam bukunya Heene (2010:76) manajemen strategik yaitu proses suatu organisasi membenahi diri agar tercapai tujuan-tujuan

keorganisasian melalui cara: (1) Analisis strategi yang proporsional; (2) Perumusan strategi menjadi keunggulannya; (3) Pengimplementasian strategi yang akurat; (4) Pengevaluasian kontinum terhadap kinerjanya. Maka, manajemen strategik dikatakan sebagai kesatuan proses manajemen pada suatu organisasi yang berulang-ulang dalam menciptakan nilai dan kemampuan untuk memperluas distribusi dan menghantarnya kepada pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan (Heene, 2010:9).

Kenyataannya, manajemen strategik di Kantor Bappeda Kabupaten Sinjai sangat efektif, terbukti dengan penggunaan sumber daya yang digunakan dengan baik sehingga tujuannya berjalan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Situasi ini sejalan dengan pendapat Jauch Lawrence R. dan Wiliam F. Glueck (1998:9) yang mengatakan bahwa, manajemen strategi kini menjadi kebutuhan yang utama untuk perusahaan atau organisasi. Sehingga pengambilan keputusan dapat menentukan apakah suatu organisasi itu unggul dan menghadapi kematiannya atau bisa bertahan hidup. Strategi ini akan berjalan baik ketika pemimpin dapat memanfaatkan potensi beserta sumber daya sebaik mungkin dalam organisasi di lingkungan yang berubah-ubah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) Bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (2) Bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia; (3) Bahwa tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan; (4) Bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional; (5) Bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan Nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya (PERMENDAGRI NO.86 TAHUN 2017).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah (PERMENDAGRI NO.86 TAHUN 2017).

Adapun tugas dari Bappeda Kabupaten Sinjai yaitu membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan pada bagian strategi perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah seperti, penelitian dan pengembangan, serta koordinasi atau pengendalian atas pelaksanaannya. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya

sebagai lembaga perencana, koordinasi dalam struktur perencanaan pembangunan di daerah, baik itu kecamatan, dinas daerah, instansi vertikal, dan badan-badan pemerintahan lainnya paling utama dalam melaksanakan pemerintahan yang efektif serta efisien. Koordinasi paling dibutuhkan di setiap organisasi terutama organisasi birokrasi pemerintah karena adanya pengelompokan kerja serta spesialisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan semua kelompok organisasi yang berperan aktif di Kantor Bappeda harus bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dengan lancar, efektif dan mengarah pada tujuan nasional.

Kenyataannya, Bappeda Kabupaten Sinjai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai badan koordinasi perencanaan pembangunan berjalan secara optimal. Situasi ini dilihat pada beberapa proyek pembangunan di Kabupaten Sinjai yang berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini juga dapat dilihat pada penghargaan yang telah diraih seperti, penghargaan terbaik ke II Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2018 kategori Kabupaten (SITUSRESMIPEMERINTAHKABUPATENSINJAI.COM 28/07/18).

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah (PERMENDAGRI NO.86 TAHUN 2017). Kenyataannya, Bappeda Kabupaten Sinjai dalam pengimplementasiannya, memiliki banyak akses untuk mewujudkan pembangunan daerah serta

ruang gerak Pemerintah Daerah pada perencanaan dan pengaturan pembangunan yang sesuai potensi dan prioritas daerah sangat luas.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui masalah yang berkaitan dengan penerapan manajemen strategik dan pembangunan daerah. Masalahnya yaitu apakah penggunaan sumber daya di Kantor Bappeda kabupaten Sinjai digunakan dengan baik, apakah Kantor Bappeda Kabupaten Sinjai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai badan koordinasi perencanaan pembangunan berjalan secara optimal atau tidak, apakah benar Pemerintah Kabupaten Sinjai memiliki akses dan ruang gerak yang luas untuk mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, Peneliti ingin mengetahui lebih dalam dan membuktikan kebenaran dengan adanya fakta-fakta yang terjadi di Kantor Bappeda Kabupaten Sinjai.

Menariknya penelitian ini karena akan mengetahui aspek-aspek yang dapat dijadikan sebagai indikator terkait penerapan manajemen strategik dan pembangunan daerah, sehingga dengan mengetahui sejumlah indikator tersebut, maka dapat diketahui apakah penerapan manajemen strategik berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di Kantor BAPPEDA Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengangkat judul: **“Pengaruh Penerapan Manajemen Strategik terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya yaitu

1. Seberapa baik penerapan manajemen strategi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai ?
2. Seberapa baik pembangunan daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai ?
3. Seberapa besar pengaruh penerapan manajemen strategi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui seberapa baik penerapan manajemen strategi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.
2. Mengetahui seberapa baik pembangunan daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.
3. Menganalisis pengaruh penerapan manajemen strategik terhadap pelaksanaan pembangunan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yaitu untuk mengembangkan teori dan konsep yang berhubungan dengan penerapan manajemen strategik dan pelaksanaan pembangunan serta diharapkan dapat digunakan pada penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis yaitu dapat memberikan masukan kepada Pemerintah-Pemerintah yang ada di Kabupaten lain untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga terwujud pemerataan, keadilan, dan kedamaian di lingkungan masyarakatnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen Strategik

1. Teori Manajemen Strategik

Manajemen strategik yaitu suatu seni dan ilmu dari pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan yang penting antara tugas-tugas yang mengharuskan suatu organisasi untuk menggapai tujuan di masa yang akan datang (Agustisnus, 1996:15). Manajemen strategik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan kegiatan dan keputusan yang membuahkan hasil formulasi dan implementasi rencana-rencana yang dirancang (Pearce dan Robinson, 1997:20).

Menurut Houthoodf (2001) dalam bukunya Heene (2010:76) Manajemen strategik secara sangat pragmatis yaitu sebagai suatu proses dimana organisasi membenahi diri agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan cara: (1) analisis strategi yang proporsional; (2) perumusan strategi menjadi keunggulannya; (3) pengimplementasian strategi yang akurat; (4) pengevaluasian kontinum terhadap kinerjanya. Di samping itu, menurut Siagian (2007:76) manajemen strategik yaitu kumpulan aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya berfokus dan komprehensif, serta menetapkan cara pelaksanaannya, yang dilakukan oleh pimpinan dan diterjemahkan oleh kelompok yang ada di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Manajemen strategik menfokuskan pada perpaduan/pembauran aspek-aspek pemasaran, riset dan pengembangan, akuntansi dan produksi/operasional

dari sebuah bisnis (Agustisnus, 1996:15). Manajemen strategik bertujuan untuk menciptakan efektivitas jangka panjang organisasi itu, didalam dua lingkungan, yakni pada satu sisi lingkungan kewenangan khusus ataupun cakupan aktivitas dari organisasi di samping itu, manajemen strategik mengintegrasikan semua proses manajemen lainnya dengan tujuan mengembangkan diri berdasarkan suatu pendekatan yang efektif dalam menetapkan tujuan yang rasional dari organisasi, rasional, dan sistematis kemudian mengaktualisasikannya, memantau, dan mengevaluasinya (Foster, 1999:15).

Menurut Wheelen dan Hunger (2012 : 16) ada empat unsur manajemen strategik sebagai berikut:

- a. *Environmental scanning* (analisis lingkungan) merupakan proses memonitor, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi dari lingkungan baik internal dan eksternal terhadap individu-individu yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan menganalisis lingkungan yaitu untuk mengukur nilai dari lingkungan organisasi secara utuh baik internal dan eksternal yang akan menentukan masa depan organisasi.
- b. *Strategy formulation* (formulasi strategi) merupakan peningkatan strategi jangka panjang untuk membuat sebuah tata kelola manajemen yang efektif dari peluang maupun ancaman dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi. Perumusan strategik meliputi:

- 1) Misi

Misi adalah alasan keberadaan organisasi. Menggambarkan aktivitas organisasi dan sasarannya.

2) Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan.

3) Strategi

Strategi adalah menspesifikasikan bagaimana organisasi dapat mewujudkan visi yang telah direncanakan sebelumnya.

4) Kebijakan

Kebijakan adalah panduan luas yang menggabungkan antara perumusan strategi dan implementasi kemudian dieksposisi dan diimplementasi dengan menggunakan strategi dan tujuan masing-masing.

c. *Strategy implementation* (implementasi strategi) merupakan suatu tahap dimana kebijakan dan strategi mempunyai berbagai aktivitas melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.

1) Program

Program merupakan pernyataan langkah-langkah atau aktivitas yang digunakan untuk mengatasi perencanaan dalam sekali penggunaan.

2) Anggaran

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan atau mengendalikan.

3) Prosedur

Prosedur merupakan sistem teknik yang terurut yang merupakan penggambaran secara detail bagaimana suatu pekerjaan diselesaikan.

d. *Evaluation and control* (evaluasi dan kontrol) adalah sebuah proses kegiatan dan pencapaian hasil dari suatu organisasi yang dimonitor sehingga hasil yang telah tercapai dapat dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

- 1) Menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal
- 2) Pengukuran kinerja
- 3) Pengambilan tindakan perbaikan

Proses manajemen strategik bersifat dinamis yang merupakan sekumpulan, komitmen, dan aktivitas yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai daya saing strategis dan membuahkan hasil yang tinggi. (Kuncoro, 2006:13).

B. Konsep Pembangunan Daerah

1. Pengertian Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya (PERMENDAGRI NO.86 TAHUN 2017). Oleh karena itu, aktivitas pembangunan harus dibentuk agar kehidupan masyarakat berubah menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan perlu berisi usaha agar masyarakat memiliki saluran-saluran di berbagai sumber ekonomi sekaligus politik (Sunyoto, 2008:310).

Rencana yang baik belum tentu bisa menghasilkan tujuan yang baik sesuai yang diharapkan. Hal ini karena dalam model proses manajemen pembangunan daerah, di samping perencanaan masih ada fungsi-fungsi lain. Fungsi-fungsi

tersebut adalah pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Pembangunan bisa gagal atau tidak optimal dalam pencapaian tujuan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, jika satu atau beberapa fungsi ini tidak dijalankan secara baik (Nyoman, 2005:70).

Penyusunan rencana akan selalu mengalami hambatan. Hambatan ini berbentuk (1) Ketidakmauan dan ketidakmampuan penyusun rencana menangkap filosofi otonomisasi daerah; (2) Ketidakmampuan, kelambatan atau ketidakpengalaman tim perencana dalam menyusun rencana yang baik, sesuai standar dan mudah dimengerti; (3) Buruknya kerangka pemikiran dasar tentang daerah yang bersangkutan; (4) Resistensi anggota tim penyusun rencana dan masyarakat terhadap satu perubahan haluan pembangunan atau penggantian sektor unggulan; dan (5) Mentalitas memandang rencana, terutama rencana jangka panjang, sebagai tidak penting dan hanya sekedar untuk memenuhi syarat yang digariskan oleh peraturan pembangunan daerah (Nyoman, 2005:72).

Pembangunan daerah otonom adalah kegiatan yang bersifat publik. Tujuan organisasi pembangunan daerah akan bersifat untuk publik dan cukup berbeda dari tujuan organisasi perusahaan pada umumnya. Tujuan pembangunan daerah bisa berbentuk misalnya tingkat kemajuan sosial ekonomi yang tinggi (Nyoman, 2005:11).

2. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan dan restriksi-restriksi yang membentang daerah yang bersangkutan akan mengakibatkan sistem skala prioritas sektor atau produk dan pengurangan atau penghapusan restriksi dilakukan, sehingga dimasukkan

menjadi langkah awal dalam langkah-langkah yang tersusun dalam perencanaan. Semua ini mengartikan pentingnya pemecahan tujuan umum yang sifatnya jangka panjang menjadi beberapa tujuan jangka pendek dan menengah. Proses yang tak ada akhirnya dan menempatkan kemajuan sosial ekonomi sebagai tujuan pembangunan, ini berarti kemajuan ini merupakan sebagai tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu (1) Menciptakan pendapatan bagi masyarakat daerah yang bersangkutan dan perolehan pajak bagi pemerintah daerah; (2) Mengadakan kesempatan atau semacam laboratorium tempat paraktik bagi daerah yang bersangkutan untuk belajar membuat dan mengembangkan sendiri. Tujuan dalam jangka menengah yaitu menempatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan maupun penelitian yang sesuai di daerah yang bersangkutan agar mampu menghasilkan sendiri sumber daya manusia berkualitas tinggi dan teknologi ataupun *modified technology* yang memadai (Nyoman, 2005:55).

3. Pelaksanaan Pembangunan

Secara umum pembangunan merupakan proses perubahan terus-menerus untuk mengarah ke perubahan yang lebih baik sesuai norma-norma yang berlaku. Menurut Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusuma (2005) pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Menurut Siagian (1974) dalam bukunya *Taliziduhu* (1990:11) pembangunan adalah susunan proses perubahan dan pertumbuhan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara serta pemerintah yang mengarah ke modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan menurut Portes (1976) pembangunan merupakan perubahan ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini

sesuai dengan pendapat Deddy T. Tikson (2005) yang mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi untuk mengarah ke tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan dari hakekat pembangunan, maka pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan

- a. Masyarakat adil dan makmur;
- b. Pemerataan kesejahteraan material dan spiritual;

Kesemuanya itu berdasarkan atas filosofi Negara dalam kondisi merdeka, berdaulat bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana berkehidupan bangsa yang tentram, tertib, aman, dan dinamis serta berada dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. (LEMHANAS,1997:17)

Tujuan pembangunan nasional identik dengan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam setiap UUD sebuah negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial secara menyeluruh, merata, dan adil dirasakan oleh seluruh rakyat.

4. Strategi Pembangunan

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya merupakan pembangunan yang berlangsung di beberapa daerah Negara yang dilakukan dengan keterlibatan seluruh masyarakat. Pilihan untuk ikutserta itu dilakukan dengan pertimbangan yang rasional dan tanpa paksaan (Zainal, 2008:26).

Menurut Zainal (2008:27), strategi pembangunan, yaitu

- a. Berkenaan dengan upaya pemberdayaan politik rakyat. Artinya, rakyat diberi hak dan wewenang untuk berpendapat sesuai keinginan dan kepentingannya.
- b. Pengembangan kemampuan, keahlian dan keterampilan, baik untuk mengatur sumber daya setempat maupun untuk dapat berperan serta seperti, pendidikan dan pelatihan serta pengadaan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari prasarana fisik, kemudahan urusan secara administrasi, penyediaan jaringan komunikasi dan informasi yang dibutuhkan.
- c. Program sosial kemasyarakatan yang berhubungan terhadap nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

5. Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Daerah

Penggunaan indikator dan variabel pembangunan dapat berbeda di setiap Negara. Di Negara yang perekonomiannya masih rendah, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar misalnya, pengadaan listrik, layanan kesehatan, serta harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

Indikator pelaksanaan pembangunan dapat diukur dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan, meliputi: (1) Struktur ekonomi dan (2) Indeks pembangunan manusia (Deddy T. Tikson, 2005). Penjelasan kedua indikator pelaksanaan pembangunan tersebut dapat diuraikan, sebagai berikut:

a. Struktur ekonomi

Peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan suatu perubahan yang struktural dalam ilmu ekonomi dan golongan sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi, peningkatan per kapita, perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah, pendapatan nasional dalam kontribusi sektor industri dan jasa akan berkembang terus.

b. Indeks pembangunan manusia

Indeks pembangunan manusia adalah suatu proses untuk membangun alternatif-alternatif yang bisa dilaksanakan oleh manusia. Ada tiga elemen yang paling menentukan dalam pembangunan, yaitu: (1) Umur panjang dan sehat; (2) Perolehan dan pengembangan pengetahuan; (3) Peningkatan terhadap akses untuk mengarah ke perubahan yang lebih; dan (4) Kualitas sumber daya manusia.

6. Dampak Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan suatu aktivitas yang melibatkan banyak orang dan para perencana belum tentu akan ikut berkecimpung dalam penjalanannya. Sekalipun penjalanannya dimonitor oleh para perencana, inipun belum menjamin bahwa yang digariskan dalam rencana akan terjalankan secara utuh. Bisa saja pola sistematika yang ada dibenak perencana bukan merupakan pola sistematika yang ada dibenak pihak yang menjalankan nanti. Akibatnya pihak pelaksana akan terlalu sering mengoreksi pelaksanaannya. Kerangka berpikir yang sama tentang sistematika rencana perlu ada dahulu dikalangan perencana dan pelaksana. Sesudah ada kesamaan dalam kerangka berpikir dikalangan pelaku di daerah, perlu dicermati juga sistematika rencana yang

tersusun untuk menghindari salah kaprah dalam menerjemahkannya ke dalam pelaksanaan dan bahkan pengawasannya di lapangan nanti (Nyoman, 2005:22).

7. Penanggulangan Dampak

Penanggulangan dampak pembangunan sangat penting karena para aktivis pembangunan dan masyarakat yang sedang membangun, menginginkan akibat-akibat positif dari pembangunan tersebut. Proyek pembangunan yang dibangun untuk masyarakat adalah suatu pembaharuan yang membutuhkan difusi, yaitu penyebaran unsur-unsur pembangunan sampai warga masyarakat memutuskan untuk menerimanya (*adoption*). Disamping itu, bentuk kekhawatiran akan hadirnya nilai-nilai yang kurang manusiawi juga banyak diidentifikasi dari berbagai kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat pasca industri. Dari berbagai pertimbangan oleh karena perubahan dalam pembangunan masyarakat bukan hanya mengandalkan pada perubahan spontan yang bersifat evolusi, tetapi juga ada unsur perubahan yang diinduksi maka induksi yang dilakukan bukan semata-mata dimaksudkan untuk percepatan perubahan melainkan juga untuk pengarahan perubahan. Perlu disadari bahwa walaupun pembangunan masyarakat dapat dianggap perubahan yang direncanakan tetapi dampak negatif masih mungkin muncul dalam pelaksanaannya.

C. Pengaruh Penerapan Manajemen Strategik terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Manajemen strategi merupakan proses dimana suatu organisasi membenahi diri agar tujuan-tujuan keorganisasian dapat tercapai dengan analisis strategi yang proporsional, perumusan strategi yang menjadi keunggulannya, pengimplementasian strategi yang akurat, pengevaluasian kontinum terhadap

kinerjanya. Sedangkan strategi pembangunan daerah itu sendiri secara umum adalah merupakan cara atau jalan terbaik untuk menggapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai visi dan misi yang telah ditentukan semula dalam rencana. Tanpa adanya manajemen strategi yang baik, maka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah menjadi sukar diwujudkan secara optimal. Kemudian, dari manajemen strategi ini akan dapat pula disusun lebih lanjut beberapa kebijakan, program dan kegiatan untuk dapat merealisasikan pelaksanaan strategi pembangunan daerah secara baik dalam masyarakat (Sjafrizal, 2014:335). Berdasarkan pendapat para ahli, disimpulkan bahwa penerapan manajemen strategik mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

D. Kerangka Pikir

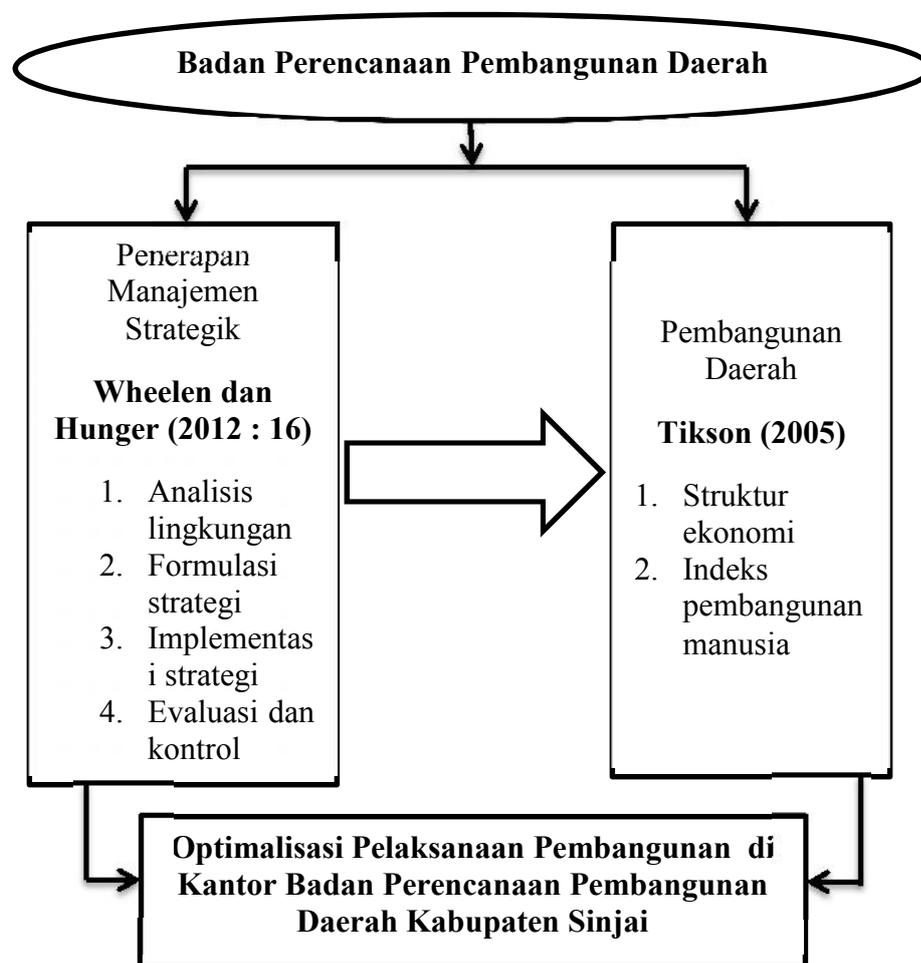
Manajemen strategik merupakan proses dimana suatu organisasi membenahi diri agar tujuan-tujuan keorganisasian dapat tercapai dengan analisis strategi yang proporsional, perumusan strategi yang menjadi keunggulannya, pengimplementasian strategi yang akurat, pengevaluasian kontinum terhadap kinerjanya. Teori Wheelen dan Hunger (2012 : 16) yang berisi tentang indikator manajemen strategik, meliputi: (1) Analisis lingkungan; (2) Formulasi strategi; (3) Implementasi strategi; (4) Evaluasi dan kontrol.

Pembangunan daerah adalah merupakan cara atau jalan terbaik untuk menggapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai visi dan misi yang telah ditentukan semula dalam rencana. Teori Deddy T. Tikson (2005) yang berisi

tentang indikator pelaksanaan pembangunan daerah dapat diukur dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan, meliputi: (1) Struktur ekonomi dan (2) Indeks pembangunan manusia.

Untuk lebih jelasnya, kerangka pikir dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pikir



E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini, adalah:

1. Penerapan manajemen strategik

- a. *Environmental scanning* (analisis lingkungan), yaitu proses memonitor, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi dari lingkungan baik internal dan eksternal kepada masyarakat sehingga Kantor Bappeda Kabupaten Sinjai memiliki akses dan ruang gerak yang luas untuk mewujudkan pembangunan daerah sesuai tujuan yang ditetapkan.
- b. *Strategy formulation* (formulasi strategi), yaitu peningkatan strategi jangka panjang untuk membuat sebuah tata kelola manajemen yang efektif dari peluang maupun ancaman serta mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan Kantor Bappeda Kabupaten Sinjai. Peluang Kantor Bappeda Kabupaten Sinjai yaitu cenderung melakukan berbagai kegiatan, ancaman yaitu memiliki banyak saingan keahlian dari organisasi lain, kekuatan yaitu tersedia sumber daya, dan kelemahan yaitu sebagian Pegawai kurang aktif dalam menjalankan tugasnya.
- c. *Strategy implementation* (implementasi strategi), yaitu suatu tahap dimana strategi dan kebijakan diletakkan dalam serangkaian aksi melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur di Kantor Bappeda Kabupaten Sinjai, seperti dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai badan koordinasi perencanaan pembangunan.
- d. *Evaluation and control* (evaluasi dan kontrol), yaitu sebuah proses kegiatan dan pencapaian hasil dari suatu organisasi yang dimonitor sehingga hasil yang telah tercapai dapat dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

2. Pembangunan daerah

- a. Struktur ekonomi, yaitu perkembangan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita yang mencerminkan suatu perubahan yang struktural dalam ilmu ekonomi dan golongan sosial di Kantor Bappeda Kabupaten Sinjai.
- b. Indeks pembangunan manusia, yaitu suatu tahap untuk membangun alternati-alternatif yang bisa dilaksanakan oleh pegawai Bappeda Kabupaten Sinjai. Ada tiga elemen yang menentukan dalam pembangunan, yaitu: (1) Umur panjang dan sehat; (2) Perolehan dan pengembangan pengetahuan; (3) Peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik; (4) Kualitas sumber daya manusia, seperti penggunaan sumber daya.

F. Hipotesis

Hipotesis penelitian:

“Penerapan Manajemen strategik berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai”.

Hipotesis statistik:

(Ho) $\rho = 0$: Tidak ada pengaruh antara penerapan manajemen strategik terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

(Ha) $\rho \neq 0$: Ada pengaruh antara penerapan manajemen strategik terhadap pelaksanaan pembangunan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sinjai, khususya di Kantor BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) karena untuk mengetahui apakah penerapan manajemen strategik berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di Kantor BAPPEDA Kabupaten Sinjai.

B. Jenis Penelitian

Menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena untuk mengetahui apakah penerapan manajemen strategik berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di Kantor BAPPEDA Kabupaten Sinjai dan menggunakan pendekatan survey dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter dari kasus atau sutau kejadian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah pegawai di Kantor Bappeda berjumlah 100 orang sedangkan teknik penarikan sampel yang dipakai ialah *simple random sampling* karena dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Penentuan sampel menggunakan rumus slovin

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

ket:

- n = jumlah sampel
 N = Jumlah Populasi
 e = presentasi kelonggaran ketelitian karena kesalahan penerapan sampel (10%)

Diketahui jumlah pegawai = 100

Dan tingkat presentasi kelonggaran sampel 10%

Maka dapat dihitung sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{100}{1 + 100 \times (10\%)^2} = \frac{100}{1 + 100 \times 0,01} = \frac{100}{1 + 1} = \frac{100}{2} = 50$$

Jadi, sampel yang diambil sebanyak 50 dengan memakai *simple random sampling* (acak) karena jika menggunakan populasi, maka data yang diteliti akan sangat banyak dan bisa berakibat ketidaktelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu upaya untuk mengamati variabel yang diteliti. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Metode Angket (Kuesioner)

Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan yang disampaikan kepada responden untuk dijawab secara tertulis. Nilai variabel yang diukur menggunakan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih

akurat, efisien, dan komunikatif. *Skala Likert* digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel penelitian, yang terdiri atas variabel penerapan manajemen strategik dan pembangunan daerah.

Ada 5 (lima) pilihan jawaban pada setiap item pertanyaan, yaitu:

- a. Jawaban Sangat Setuju (SS): diberi skor 5
- b. Jawaban Setuju (S): diberi skor 4
- c. Jawaban Ragu-Ragu (RR): diberi skor 3
- d. Jawaban Tidak Setuju (TS): diberi skor 2
- e. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS): diberi skor 1

Kuesioner penelitian yang dibuat oleh peneliti ini diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk menguji keakuratan/ kevalidan kuesioner penelitian, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk menguji kehandalan/ konsistensi kuesioner penelitian. Kuesioner yang sudah valid dan reliabel seluruh butirnya dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh keadaan mengenai keadaan lingkungan di Kantor Bappeda Kabupaten Sinjai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengambil data sekunder yang memuat informasi yang ingin didapatkan yang bersumber dari dokumen tertulis, jurnal, agenda dan sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data, yaitu:

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (generalisasi).

Teknik analisis statistik deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa tabel, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, serta perhitungan persentase (%). Penentuan persentase dari perolehan data hasil kuesioner dari masing-masing variabel menggunakan rumus perhitungan persentase:

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan rumus:

n = Skor yang diperoleh

N = Skor ideal

% = Persentase

Data yang sudah dipersentasekan lalu ditafsirkan dengan kalimat-kalimat yang bersifat kualitatif.

Dimana hasil persentase itu dapat digolongkan sebagaimana terlihat pada tabel 3.1:

Tabel 3.1. Kriteria Jawaban Responden

Persentase Jawaban	Tafsiran Kualitatif
80% - 100%	Sangat Baik
60% - <80%	Baik
40% - <60%	Cukup Baik
20% - < 40%	Kurang Baik
0% - < 20%	Sangat Tidak Baik

(Arikunto, 2010: 246)

2. Teknik Regresi Linear Sederhana

Analisis ini untuk melihat pengaruh variabel penerapan manajemen strategik terhadap variabel pembangunan daerah. Adapun rumus persamaan regresi sederhana adalah:

$$\hat{Y} = a + b X$$

Keterangan rumus:

- \hat{Y} = variabel pembangunan daerah
- X = variabel penerapan manajemen strategik
- a = konstanta
- b = koefisien regresi

Analisis regresi menggunakan bantuan *software SPSS version 23*. Dasar pengambilan keputusannya, adalah:

- a. Jika nilai P value (sig) $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- b. Jika nilai P value (sig) $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Bappeda di bentuk berdasarkan pertimbangan:

1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.
2. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu.

Sejarah Bappeda:

1. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1969
3. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1969
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Keputusan Mendagri Nomor 362 Tahun 1997, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Dan Wilayah
7. Keputusan Mendagri Nomor 185 Tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai

Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yaitu membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, yaitu:

- a. BAPPEDA mempunyai fungsi penyelenggaraan penelitian di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka pengembangan pembangunan secara umum
- b. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah
- c. Penyusunan REPELITA daerah
- d. Penyusunan Program Tahunan Daerah
- e. Pelaksanaan kerjasama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah

- g. Pemantauan dan evaluasi, penelitian dan perencanaan pembangunan daerah
- h. Penyelenggaraan tugas pembantuan
- i. Pengelolaan kesekretariatan dan urusan rumah tangga BAPPEDA
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan.

2. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai

a. Visi

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yaitu “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Sinergis, Partisipatif Dan Akuntabel Mendukung Akselerasi Pembangunan”

Penjabaran makna-makna dari visi Bappeda:

- 1) **Terwujudnya** : adalah merealisasikan rencana kegiatan menjadi kenyataan
- 2) **Perencanaan** : adalah suatu proses untuk menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya
- 3) **Pembangunan** : adalah proses perubahan yang dilakukan secara terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik melalui upaya secara terencana berdasarkan norma-norma tertentu yang adil bagi segala usia, perempuan dan laki-laki
- 4) **Berkualitas** : adalah menghasilkan capaian tujuan kegiatan yang dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan
- 5) **Sinergis** : adalah perencanaan yang mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai

- 6) **Partisipatif** : adalah masyarakat pro aktif dalam turut menentukan arah dan tujuan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian program dan kegiatan pembangunan secara berkelanjutan
- 7) **Akuntabel** : adalah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber imputnya, prosesnya maupun penentuan manfaatnya
- 8) **Akselerasi Pembangunan** : adalah mampu berperan sebagai pendorong dan penggerak dalam percepatan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang maju berkemakmuran dan berkualitas.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilanasi oleh visi, maka visi badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten sinjai 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas aparat SDM perencana
- 2) Meningkatkan integrasi, koodinasi, sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan serta pengelolaan ketersediaan data dan informasi rencana pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang mengakomodir partisipasi berbagai stakeholder

3. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai

Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun susunan organisasi Badan, terdiri atas:

a. Kepala Badan

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai. Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perencanaan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, partisipasi dan transparansi.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
- 2) Penyelenggaraan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah kabupaten;
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pemerintah daerah kabupaten;
- 4) Pengoordinasian pelaporan secara berkala hasil pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5) Penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintah perencanaan pembangunan; dan

- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Badan dirinci sebagai berikut:

- 1) Merumuskan rencana kerja perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama perencanaan;
- 2) Mengoordinasikan pengkajian perencanaan dan program internal Sekretariat;
- 3) Mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Mengoordinasikan pengkajian anggaran belanja;
- 5) Mengoordinasikan pengendalian administrasi belanja;
- 6) Mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 7) Mengoordinasikan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 8) Mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- 9) Mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan dan keprotokoleran;
- 10) Mengoordinasikan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- 11) Mengoordinasikan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat dan Badan;
- 12) Mengoordinasikan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 13) Mengoordinasikan pembinaan jabatan fungsional; dan
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

b. Sekretariat

Sekretaris adalah sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- 2) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- 3) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris dirinci sebagai berikut:

- 1) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- 3) Mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja serta pengelolaan administrasi keuangan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian dirinci sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan SubBagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
- d) Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Badan;
- e) Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing- masing jabatan di lingkungan Badan;
- f) Menyusun laporan kinerja Badan meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan;
- g) Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);

- h) Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), dan Tahunan (Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan Calk) Badan;
- j) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Badan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian dirinci sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Badan;
- d) Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;

- e) Melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f) Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
- g) Mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Badan;
- h) Menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Badan;
- i) Memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan;
- j) Menyusun dan menginventarisir barang asset daerah yang dikelola oleh Badan;
- k) Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

c. Bidang Infrastruktur dan Ekonomi

Bidang Infrastruktur dan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi perencanaan infrastruktur dan ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Infrastruktur dan Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- 2) Pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- 3) Pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- 7) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- 8) Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi Bidang Infrastruktur dan Ekonomi di daerah;
- 10) Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- 11) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kebijakan perencanaan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi; dan

12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok Kepala Bidang dirinci sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis, program dan anggaran Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- 3) Melaksanakan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- 5) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- 8) Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
- 9) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi Bidang Infrastruktur dan Ekonomi di daerah;
- 10) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;

11) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi; dan

12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Sub Bidang Infrastruktur, Penataan Ruang dan Komunikasi

Sub Bidang Infrastruktur, Penataan Ruang dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Ekonomi dalam perencanaan infrastruktur, penataan ruang dan komunikasi dibidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.

Tugas pokok Kepala Sub Bidang dirinci sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Infrastruktur, Penataan Ruang dan Komunikasi;
- c) Menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- d) Menyusun rancangan RKPD Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;

- e) Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- f) Merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- g) Melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- h) Merancang pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- i) Merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;

- j) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan

Sub Bidang Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Ekonomi dalam melaksanakan perencanaan dibidang Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Tugas pokok Kepala Sub Bidang dirinci sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pertanian dan Perikanan;
- c) Menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- d) Menyusun rancangan RKPD Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- e) Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- f) Merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- g) Melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah

Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;

- h) Merancang pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPDDan APBD Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- i) Merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- j) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Sub Bidang Ekonomi

Sub Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi perencanaan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, penanaman modal, perdagangan, perindustrian dan energi sumber daya mineral.

Tugas pokok Kepala Sub Bidang dirinci sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub BidangEkonomi;
- c) Menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;

- d) Menyusun rancangan RKPD Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- e) Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- f) Merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- g) Melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- h) Merancang pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- i) Merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- j) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral; dan

- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

d. Bidang Sosial dan Pemerintahan

Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Sosial dan Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang sosial dan pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- 2) Pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Sosial dan Pemerintahan;
- 7) Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Bidang Sosial dan Pemerintahan;

- 8) Pengeordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi Bidang Sosial dan Pemerintahan di daerah;
- 9) Pengeordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- 10) Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok Kepala Bidang dirinci sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis, program dan anggaran Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- 3) Melaksanakan verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- 5) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Sosial dan Pemerintahan;

- 8) Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- 9) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi Bidang Sosial dan Pemerintahan di daerah;
- 10) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- 11) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Sub Bidang Sosial

Sub Bidang Sosial dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan melaksanakan perencanaan dibidang kearsipan, perpustakaan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan dan sosial.

Tugas pokok Kepala Sub Bidang dirinci sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub

Bidang Sosial;

- c) Menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;
- d) Menyusun rancangan RKPD Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;
- e) Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;
- f) Merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;
- g) Melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;

- h) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;
- i) Merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial;
- j) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Kearsipan, Perpustakaan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Sosial; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sub Bidang Pemerintahan

Sub Bidang Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan pemerintahan melaksanakan perencanaan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemerintahan umum.

Tugas pokok Kepala Sub Bidang dirinci sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan;
- c) Menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- d) Menyusun rancangan RKPD Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- e) Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- f) Merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- g) Melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;

- h) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- i) Merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum;
- j) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemerintahan Umum; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Sub Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Sub Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan melaksanakan perencanaan dibidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Tugas pokok Kepala Sub Bidang dirinci sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;

- c) Menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- d) Menyusun rancangan RKPD Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- e) Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- f) Merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- g) Melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- h) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- i) Merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- j) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

e. Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Badan melaksanakan sebagian tugas Badan meliputi perencanaan makro, pembiayaan dan evaluasi pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengoordinasian kebijakan keuangan dan pengendalian perencanaan makro;
- 2) Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran Pemerintah Daerah;
- 3) Perumusan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, perencanaan, pembiayaan, pembinaan dan pengendalian, pemantauan serta evaluasi arah pembangunan;
- 4) Perumusan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- 5) Pengoordinasian dan menyinkronkan pelaksanaan perencanaan pembiayaan dan penganggaran Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait dokumen perencanaan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian terkait dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- 7) Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan kepada Perangkat Daerah;
- 8) Pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok Kepala Bidang dirinci sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan dan pengendalian penganggaran dan perencanaan makro;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan dan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 5) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan daerah;
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJP, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- 8) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan makro, pembiayaan dan evaluasi pembangunan kepada perangkat daerah kabupaten;
- 9) Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi Renstra dan Renja SKPD;
- 10) Melaksanakan evaluasi RPJP, RPJMD dan RKPD; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Sub Bidang Perencanaan Makro

Sub Bidang Perencanaan Makro dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Makro,

Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah dan kebijakan pembangunan tahunan Daerah.

Tugas pokok Kepala Sub Bidang dirinci sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja kebijakan perencanaan makro;
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Makro;
- c) Merancang pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah;
- d) Melakukan evaluasi terhadap regulasi Pemerintah Daerah terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e) Melakukan pembinaan dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kepada Perangkat Daerah;
- f) Merancang sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah terhadap kegiatan K/L dan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional di Daerah;
- g) Merancang kebijakan pembangunan pada pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- h) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan terhadap perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah dan kebijakan pembangunan tahunan Daerah; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sub Bidang Data dan Evaluasi

Sub Bidang Data dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan pemantauan, pengelolaan data dan evaluasi pembangunan Daerah.

Tugas pokok Kepala Sub Bidang dirinci sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja kebijakan teknis pemantauan, pengelolaan data dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Data dan Evaluasi;
- c) Merancang pelaksanaan pemantauan, pengelolaan data dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah;
- d) Merancang pelaksanaan pemantauan, pengelolaan data, evaluasi dan pengendalian hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
- e) Melakukan pemantauan dan pengendalian dalam pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan Daerah;
- f) Melakukan pengendalian dan evaluasi alokasi pendanaan APBD pada kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah dan kebijakan pembangunan tahunan Daerah;
- g) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pemantauan, pengelolaan data, evaluasi dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD; dan

- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan

Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan program pembiayaan pembangunan.

Tugas pokok Kepala Sub Bidang dirinci sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja pelaksanaan program pembiayaan pembangunan;
- b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan;
- c) Merancang sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan alokasi pendanaan pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan Daerah;
- d) Merancang alokasi pendanaan APBN dan APBD terkait perencanaan pembangunan tahunan;
- e) Merancang sinergitas dan harmonisasi alokasi pendanaan APBN dan APBD terhadap kegiatan K/L dan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional di Daerah;
- f) Merancang alokasi pendanaan APBN dan APBD pada pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- g) Melakukan koordinasi dengan SKPD/Unit Kerja dalam penyusunan dan

perencanaan pembiayaan pembangunan;

- h) Melakukan koordinasi penyusunan RKA dan DPA untuk perencanaan tahunan;
- i) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan perencanaan pembangunan; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

B. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang dideskripsikan kepada 50 orang Pegawai sebagai responden utama di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai. Dari kuesioner yang telah dideskripsikan kepada Pegawai sebanyak 50 kuesioner dari setiap respondennya dan dalam penyajian data meliputi data-data tentang identitas responden dan retribusi jawaban Pegawai terhadap pertanyaan yang akan diuraikan. Selain itu terlebih dahulu Peneliti akan menyajikan tabel yang berupa jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuesioner dalam penelitian yang dilakukan Peneliti. Adapun tabelnya sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Total kuesioner	50
Total pengembalian	50
Total kuesioner yang tidak kembali	0
Responden rate (tingkat pengembalian)	100%
Total kuesiner yang diolah	50

Sumber : kuesioner penelitian 2018

Dari data di atas dapat dilihat, jika kuesioner yang telah dibagikan kepada 50 responden Pegawai telah mendapatkan respon yang baik dari semua responden yang ada. Dengan melihat jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuesioner maka dapat diketahui beberapa data mengenai identitas responden seperti status kepegawaian dan golongan Pegawai yang akan diuraikan dalam tabel frekuensi:

Tabel 4.2. Jumlah Responden Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	39	78
2.	Tenaga honorer	11	22
Jumlah		50	100%

Sumber data: kuesioner penelitian 2018

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang diberikan responden lebih banyak Pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana jumlah persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 78% dari 39 orang, sedangkan persentase jawaban Pegawai honorer 22% dari 11 Pegawai.

Tabel 4.3. Jumlah Responden Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Frekuensi (orang)	Persentase
1	Ia – Id	0	0
2	IIda – IId	8	20,51
3	IIIa – IIIId	23	58,97
4	IVa – IVb	8	20,51
Total		39	100%

Sumber data: kuesioner penelitian 2018

Dengan adanya data di atas maka dapat diketahui jawaban yang diberikan Pegawai berstatus ASN dari golongan yang berbeda bahwa Pegawai yang bergolongan IIda – IId sebanyak 20,51% dengan jumlah 8 orang, Pegawai yang berstatus IIIa – IIIId sebanyak 58,97% dengan jumlah 23 orang, dan Pegawai yang berstatus IVa – IVb sebanyak 20,51% dengan jumlah 8 orang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jawaban yang diterima lebih banyak dari Pegawai ASN yang

bergolongan IIIa – IIIId sebanyak 58,97% dengan jumlah 23 orang dari jumlah rata-rata responden sebanyak 50.

C. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kuantitatif Penerapan Manajemen Strategi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai

Untuk dapat memberikan deskripsi tentang penerapan manajemen strategi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, maka analisis di dalam penelitian ini difokuskan pada 4 (empat) indikator penerapan manajemen strategi yang telah ditentukan sebelumnya, yakni: *environmental scanning* (analisis lingkungan), *strategy formulation* (formulasi strategi), *strategy implementation* (implementasi strategi), dan *evaluation and control* (evaluasi dan kontrol), di mana dari tiap indikator tersebut masing-masing memiliki beberapa item instrumen.

1. *Environmental Scanning* (Analisis Lingkungan)

Indikator pertama dari penerapan manajemen strategi di dalam penelitian ini yakni faktor *environmental scanning* (analisis lingkungan) yang diukur melalui 2 (dua) instrumen, yang berkaitan dengan :

- a. Memonitor
- b. Mengevaluasi

Untuk memberikan deskripsi tentang pernyataan dari ke 50 (lima puluh) responden terhadap indikator *environmental scanning* (analisis lingkungan) Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Maka dapat dilihat pada Tabel 4.4 :

Tabel 4.4. Pernyataan Responden terhadap Indikator *Environmental Scanning* (Analisis Lingkungan)

ITEM-ITEM INSTRUMEN	SS		S		RR		TS		STS		JUMLAH	
	(%)	R	(%)	R	(%)	R	(%)	R	(%)	R	(%)	R
1. Memonitor	46	23	38	19	16	8	0	0	0	0	100	50
2. Mengevaluasi	74	37	14	7	12	6	0	0	0	0	100	50
Rata-rata (%)	60%	30	26%	13	14%	7	0	0	0	0	100	50

Sumber : data primer diolah (Agustus 2018)

Hasil analisis deskriptif penerapan manajemen strategi dengan indikator *environmental scanning* (analisis lingkungan) mendapat penilaian rata-rata dari responden sebesar 60% sangat setuju, 26% setuju, 14% ragu-ragu, 0% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju.

Berdasarkan data pada Tabel 4.4, maka penerapan manajemen strategi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dengan dimensi *environmental scanning* (analisis lingkungan) mendapat 3 (tiga) pernyataan penilaian rata-rata dari 50 (lima puluh) responden, yaitu 60% atau 30 (tiga puluh) orang responden yang memberikan pernyataan sangat setuju, 26% atau 13 (tiga belas) orang responden yang memberikan pernyataan setuju, dan 14% atau 7 (tujuh) orang responden yang memberikan pernyataan ragu-ragu atas *environmental scanning* (analisis lingkungan) yang dilakukan oleh Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai telah melaksanakan *environmental scanning* (analisis lingkungan) dengan cukup baik, yaitu dengan adanya penilaian rata-rata responden sebesar 60% yang memberikan pernyataan sangat setuju.

2. *Strategy Formulation* (Formulasi Strategi)

Indikator kedua dari penerapan manajemen strategi di dalam penelitian ini yakni faktor *strategy formulation* (formulasi strategi) yang diukur melalui 2 (dua) instrumen, yang berkaitan dengan :

- a. Misi
- b. Tujuan

Untuk memberikan deskripsi tentang pernyataan dari ke 50 (lima puluh) responden terhadap indikator *strategy formulation* (formulasi strategi) Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, maka dapat dilihat pada Tabel 4.5 :

Tabel 4.5. Pernyataan Responden terhadap Indikator *Strategy Formulation* (Formulasi Strategi)

ITEM-ITEM INSTRUMEN	SS		S		RR		TS		STS		JUMLAH	
	(%)	R	(%)	R	(%)	R	(%)	R	(%)	R	(%)	R
1. Misi	66	33	26	13	8	4	0	0	0	0	100	50
2. Tujuan	62	31	38	19	0	0	0	0	0	0	100	50
Rata-rata (%)	64%	32	32%	16	4%	2	0	0	0	0	100	50

Sumber : data primer diolah (Agustus 2018)

Hasil analisis deskriptif penerapan manajemen strategi dengan indikator *strategy formulation* (formulasi strategi) mendapat penilaian rata-rata dari responden sebesar 64% sangat setuju, 32% setuju, 4% ragu-ragu, 0% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju.

Berdasarkan data pada Tabel 4.5, maka penerapan manajemen strategi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dengan dimensi *strategy formulation* (formulasi strategi) mendapat 3 (tiga) pernyataan penilaian rata-rata dari 50 (lima puluh) responden, yaitu 64% atau 32 (tiga puluh

dua) orang responden yang memberikan pernyataan sangat setuju, 32% atau 16 (enam belas) orang responden yang memberikan pernyataan setuju, dan 4% atau 2 (dua) orang responden yang memberikan pernyataan ragu-ragu atas *strategy formulation* (formulasi strategi) yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai telah melaksanakan *strategy formulation* (formulasi strategi) dengan baik, yaitu dengan adanya penilaian rata-rata responden sebesar 64% yang memberikan pernyataan sangat setuju.

3. *Strategy Implementation* (Implementasi Strategi)

Indikator ketiga dari penerapan manajemen strategi di dalam penelitian ini yakni faktor *strategy implementation* (implementasi strategi) yang diukur melalui 2 (dua) instrumen, yang berkaitan dengan :

- a. Program
- b. Anggaran

Untuk memberikan deskripsi tentang pernyataan dari ke 50 (lima puluh) responden terhadap indikator *strategy implementation* (implementasi strategi) Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Maka dapat dilihat pada Tabel 4.6:

Tabel 4.6. Pernyataan Responden terhadap Indikator Strategy Implementation (Implementasi Strategi)

ITEM-ITEM INSTRUMEN	SS		S		RR		TS		STS		JUMLAH	
	(%)	R	(%)	R	(%)	R	(%)	R	(%)	R	(%)	R
1. Program	74	37	14	7	12	6	0	0	0	0	100	50
2. Anggaran	30	15	40	20	18	9	10	5	2	1	100	50
Rata-rata (%)	52%	26	27%	13	15%	7	5%	3	1%	1	100	50

Sumber : data primer diolah (Agustus 2018)

Hasil analisis deskriptif penerapan manajemen strategi dengan indikator *strategy implementation* (implementasi strategi) mendapat penilaian rata-rata dari responden sebesar 52% sangat setuju, 27% setuju, 15% ragu-ragu, 5% tidak setuju, dan 1% sangat tidak setuju.

Berdasarkan data pada Tabel 4.6, maka penerapan manajemen strategi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dengan dimensi *strategy implementation* (implementasi strategi) mendapat 5 (lima) pernyataan penilaian rata-rata dari 50 (lima puluh) responden, yaitu 52% atau 26 (dua puluh enam) orang responden yang memberikan pernyataan sangat setuju, 27% atau 13 (tiga belas) orang responden yang memberikan pernyataan setuju, 15% atau 7 (tujuh) orang responden yang memberikan pernyataan ragu-ragu, 5% atau 3 (tiga) orang responden yang memberikan pernyataan tidak setuju, dan 1% atau 1 (satu) orang responden yang memberikan pernyataan sangat tidak setuju atas *strategy implementation* (implementasi strategi) yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai telah melaksanakan *strategy*

implementation (implementasi strategi) dengan cukup baik, yaitu dengan adanya penilaian rata-rata responden sebesar 52% yang memberikan pernyataan sangat setuju.

4. *Evaluation and Control* (Evaluasi dan Kontrol)

Indikator terakhir atau yang keempat dari penerapan manajemen strategi di dalam penelitian ini yakni faktor *evaluation and control* (evaluasi dan kontrol) yang diukur melalui 2 (dua) instrumen, yang berkaitan dengan :

- a. Menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal
- b. Pengukuran kinerja

Untuk memberikan deskripsi tentang pernyataan dari ke 50 (lima puluh) responden terhadap indikator *evaluation and control* (evaluasi dan kontrol) Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, maka dapat dilihat pada Tabel 4.7 :

Tabel 4.7. Pernyataan Responden terhadap Indikator *Evaluation and Control* (Evaluasi Dan Kontrol)

ITEM-ITEM INSTRUMEN	SS		S		RR		TS		STS		JUMLAH	
	(%)	R	(%)	R	(%)	R	(%)	R	(%)	R	(%)	R
1. Menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal	20	10	22	11	28	14	24	12	6	3	100	50
2. Pengukuran kinerja	30	15	40	20	18	9	10	5	2	1	100	50
Rata-rata (%)	25%	13	31%	16	23%	11	17%	8	4%	2	100	50

Sumber : data primer diolah (Agustus 2018)

Hasil analisis deskriptif penerapan manajemen strategi dengan indikator *evaluation and control* (evaluasi dan kontrol) mendapat penilaian rata-rata dari responden sebesar 25% sangat setuju, 31% setuju, 23% ragu-ragu, 17% tidak setuju, dan 4% sangat tidak setuju.

Berdasarkan data pada Tabel 4.7, maka penerapan manajemen strategi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dengan indikator *evaluation and control* (evaluasi dan kontrol)) mendapat 5 (lima) pernyataan penilaian rata-rata dari 50 (lima puluh) responden, yaitu 25% atau 13 (tiga belas) orang responden yang memberikan pernyataan sangat setuju, 31% atau 16 (enam belas) orang responden yang memberikan pernyataan setuju, 23% atau 11 (sebelas) orang responden yang memberikan pernyataan ragu-ragu, 17% atau 8 (delapan) orang responden yang memberikan pernyataan tidak setuju, dan 4% atau 2 (dua) orang responden yang memberikan pernyataan sangat tidak setuju atas *evaluation and control* (evaluasi dan kontrol) yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan *evaluation and control* (evaluasi dan kontrol) kurang baik, yaitu dengan adanya penilaian rata-rata responden sebesar 25% yang memberikan pernyataan sangat setuju.

Setelah menguraikan hasil analisa deskriptif dan pembahasan tentang 4 (empat) indikator penerapan manajemen strategi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dengan beberapa instrumennya masing-masing, maka selanjutnya perlu menyatukan nilai rata-rata dari masing-masing indikator agar dapat memberikan deskripsi tentang pernyataan dari responden secara umum dan menyeluruh terhadap 4 (empat) indikator penerapan manajemen strategi yang digunakan dalam penelitian ini, sekaligus pula untuk menjawab rumusan masalah yaitu seberapa baik penerapan manajemen strategi di Kantor

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai. Untuk melihat hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.8 :

Tabel 4.8. Hasil Kumulatif Pernyataan Responden terhadap 4 (Empat) Indikator Penerapan Manajemen Strategi

INDIKATOR PENELITIAN	SS (%)	S (%)	RR (%)	TS (%)	STS (%)	JUM. (%)
1. <i>Environmental scanning</i> (analisis lingkungan)	60	26	14	0	0	100
2. <i>Strategy formulation</i> (formulasi strategi)	64	32	4	0	0	100
3. <i>Strategy implementation</i> (implementasi strategi)	52	27	15	5	1	100
4. Evaluation and control (evaluasi dan kontrol)	25	31	23	17	4	100
Rata-rata (%)	50,25	29	14	5,5	1,25	100

Sumber : data primer diolah (Agustus 2018)

Berdasarkan data pada Tabel 4.8, penerapan manajemen strategi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dengan 4 (empat) indikator yang dimiliki, mendapat 5 (lima) pernyataan penilaian kumulatif rata-rata dari 50 (lima puluh) responden, yaitu 50,25% atau 25 (dua puluh lima) orang responden yang memberikan pernyataan sangat setuju, 29% atau 14 (empat belas) orang responden yang memberikan pernyataan setuju, 14% atau 7 (tujuh) orang responden yang memberikan pernyataan ragu-ragu, 5,5% atau 3 (tiga) orang responden yang memberikan pernyataan tidak setuju, dan 1,25% atau 1 (satu) orang responden yang memberikan pernyataan sangat tidak setuju atas penerapan manajemen strategi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Hasil tersebut mendeskripsikan dan membuktikan bahwa secara umum penerapan manajemen strategik di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai telah berjalan cukup baik. Penilaian kumulatif rata-rata responden atau tingkat penerapan manajemen strategi sebesar 50,25% responden yang memberikan pernyataan sangat setuju, menjadi bukti bahwa penerapan manajemen strategi di Kantor Bappeda Kabupaten Sinjai berjalan efektif dan penggunaan sumber daya digunakan dengan baik sehingga tujuannya berjalan sesuai yang diinginkan.

D. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kuantitatif Pembangunan Daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai

Untuk dapat memberikan deskripsi tentang pembangunan daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, maka analisis di dalam penelitian ini difokuskan pada 2 (dua) indikator pembangunan daerah yang telah ditentukan sebelumnya, yakni: struktur ekonomi dan *human development index* (indek pembangunan manusia), di mana dari tiap indikator tersebut masing-masing memiliki beberapa item instrumen.

1. Struktur Ekonomi

Indikator pertama dari pembangunan daerah di dalam penelitian ini yakni struktur ekonomi yang diukur melalui 4 (empat) instrumen, yang berkaitan dengan:

- a. Perkembangan ekonomi
- b. Peningkatan per kapita
- c. Perkembangan struktur industri
- d. Perbaikan tingkat upah

Untuk memberikan deskripsi tentang pernyataan dari ke 50 (lima puluh) responden terhadap indikator struktur ekonomi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, maka dapat dilihat pada Tabel 4.9 :

Tabel 4.9. Pernyataan Responden terhadap Indikator Struktur Ekonomi

ITEM-ITEM INSTRUMEN	SS		S		RR		TS		STS		JUMLAH	
	(%)	R	(%)	R	(%)	R	(%)	R	(%)	R	(%)	R
1. Perkembangan ekonomi	20	10	22	11	28	14	24	12	6	3	100	50
2. Peningkatan perkapita	44	22	38	19	14	7	4	2	0	0	100	50
3. Perkembangan sektor industry	56	28	36	18	8	4	0	0	0	0	100	50
4. Perbaikan tingkat upah	58	29	34	17	8	4	0	0	0	0	100	50
Rata-rata (%)	44,5%	22	32,5%	16	14,5%	7	7%	4	1,5%	1	100	50

Sumber : data primer diolah (Agustus 2018)

Hasil analisis deskriptif pembangunan daerah dengan indikator struktur ekonomi mendapat penilaian rata-rata dari responden sebesar 44,5% sangat setuju, 32,5% setuju, 14,5% ragu-ragu, 7% tidak setuju, dan 1,5% sangat tidak setuju.

Berdasarkan data pada Tabel 4.9, maka pembangunan daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dengan indikator struktur ekonomi mendapat 5 (lima) pernyataan penilaian rata-rata dari 50 (lima puluh) responden, yaitu 44,5% atau 22 (dua puluh dua) orang responden yang memberikan pernyataan sangat setuju, 32,5% atau 16 (enam belas) orang responden yang memberikan pernyataan setuju, 14,5% atau 7 (tujuh) orang responden yang memberikan pernyataan ragu-ragu, 7% atau 4 (empat) orang responden yang memberikan pernyataan tidak setuju, dan 1,5% atau 1 (satu) orang responden yang memberikan pernyataan sangat tidak setuju atas struktur ekonomi

yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai telah melaksanakan struktur ekonomi dengan cukup baik, yaitu dengan adanya penilaian rata-rata responden sebesar 44,5% yang memberikan pernyataan sangat setuju.

2. *Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia)*

Indikator yang terakhir dari pembangunan daerah di dalam penelitian ini yakni human development index (indeks pembangunan manusia) yang diukur melalui 4 (empat) instrumen, yang berkaitan dengan:

- a. Umur panjang dan sehat
- b. Perolehan dan pengembangan pengetahuan
- c. Peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik
- d. Kualitas sumber daya manusia

Untuk memberikan deskripsi tentang pernyataan dari ke 50 (lima puluh) responden terhadap indikator human development index (indeks pembangunan manusia) Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Maka dapat dilihat pada Tabel 4.10 :

Tabel 4.10. Pernyataan Responden terhadap Indikator *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia)

ITEM-ITEM INSTRUMEN	SS		S		RR		TS		STS		JUMLAH	
	(%)	R	(%)	R	(%)	R	(%)	R	(%)	R	(%)	R
1. Umur panjang dan sehat	38	19	38	19	24	12	0	0	0	0	100	50
2. Perolehan dan pengembangan pengetahuan	68	34	32	16	0	0	0	0	0	0	100	50
3. Peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik	56	28	34	17	10	5	0	0	0	0	100	50
4. Kualitas sumber daya manusia	56	28	34	17	10	5	0	0	0	0	100	50
Rata-rata (%)	54,5%	27	34,5%	17	11%	6	0	0	0	0	100	50

Sumber : data primer diolah (Agustus 2018)

Hasil analisis deskriptif pembangunan daerah dengan indikator human development index (indeks pembangunan manusia) mendapat penilaian rata-rata dari responden sebesar 54,5% sangat setuju, 34,5% setuju, 11% ragu-ragu, 0% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju.

Berdasarkan data pada Tabel 4.10, maka pembangunan daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dengan indikator human development index (indeks pembangunan manusia) mendapat 3 (tiga) pernyataan penilaian rata-rata dari 50 (lima puluh) responden, yaitu 54,5% atau 27 (dua puluh tujuh) orang responden yang memberikan pernyataan sangat setuju, 34,5% atau 17 (tujuh belas) orang responden yang memberikan pernyataan setuju, dan 11% atau 6 (enam) orang responden yang memberikan pernyataan ragu-ragu

atas human development index (indeks pembangunan manusia) yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Hal ini mendeskripsikan bahwa secara umum Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai telah melaksanakan *human development index* (indeks pembangunan manusia) dengan cukup baik, yaitu dengan adanya penilaian rata-rata responden sebesar 54,5% yang memberikan pernyataan sangat setuju.

Setelah menguraikan hasil analisa deskriptif dan pembahasan tentang 2 (dua) indikator pembangunan daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dengan beberapa instrumennya masing-masing, maka selanjutnya perlu menyatukan nilai rata-rata dari masing-masing indikator agar dapat memberikan deskripsi tentang pernyataan dari responden secara umum dan menyeluruh terhadap 2 (dua) indikator pembangunan daerah yang digunakan dalam penelitian ini, sekaligus pula untuk menjawab rumusan masalah yaitu seberapa baik pembangunan daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Untuk melihat hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.11 :

Tabel 4.11. Hasil Kumulatif Pernyataan Responden terhadap 2 (Dua) Indikator Pembangunan Daerah

INDIKATOR PENELITIAN	SS (%)	S (%)	RR (%)	TS (%)	STS (%)	JUM. (%)
1. Struktur ekonomi	44,5	32,5	14,5	7	1,5	100
2. <i>Human development index</i> (indeks pembangunan manusia)	54,5	34,5	11	0	0	100
Rata-rata (%)	49,5	33,5	12,75	3,5	0,75	100

Sumber : data primer diolah (Agustus 2018)

Berdasarkan data pada Tabel 4.11, pembangunan daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dengan 2 (Dua) indikator yang dimiliki, mendapat 5 (lima) pernyataan penilaian kumulatif rata-rata dari 50 (lima puluh) responden, yaitu 49,5% atau 25 (dua puluh lima) orang responden yang memberikan pernyataan sangat setuju, 33,5% atau 16 (enam belas) orang responden yang memberikan pernyataan setuju, 12,75% atau 6 (enam) orang responden yang memberikan pernyataan ragu-ragu, 3,5% atau 2 (dua) orang responden yang memberikan pernyataan tidak setuju, dan 0,75% atau 1 (satu) orang responden yang memberikan pernyataan sangat tidak setuju atas pembangunan daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Hasil tersebut mendeskripsikan dan membuktikan bahwa secara umum pembangunan daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai telah berjalan cukup baik. Penilaian kumulatif rata-rata responden atau tingkat pembangunan daerah sebesar 49,5% responden yang

memberikan pernyataan sangat setuju, menjadi bukti bahwa Kantor Bappeda Kabupaten Sinjai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai badan koordinasi perencanaan pembangunan berjalan secara optimal.

E. Hasil Regresi Linear Sederhana Pengaruh Penerapan Manajemen Strategi Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai

Tabel 4.12. *Variables Entered/Removed^a*

Model	<i>Variables Entered</i>	<i>Variables Removed</i>	<i>Method</i>
1	penerapan manajemen strategi ^b		<i>Enter</i>

a. *Dependent Variable*: pembangunan daerah

b. *All requested variables entered*

Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah Penerapan Manajemen Strategi sebagai variabel Independent dan Pembangunan Daerah sebagai *variabel Dependent* dan metode yang digunakan adalah metode *Enter*.

Tabel 4.13. *Model Summary*

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.884 ^a	.781	.776	1.24230

a. *Predictors*: (*Constant*), penerapan manajemen strategi

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,884. Dari *output* tersebut diperoleh koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,781, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Penerapan Manajemen Strategi) terhadap variabel terikat (Pembangunan Daerah) adalah sebesar 78,14%

$$R^2 = (0,884)^2 \times 100 \%$$

$$= 0,781456 \times 100 \%$$

$$= 78,14 \%$$

Tabel 4.14. ANOVA^a

Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	263.921	1	263.921	171.011	.000 ^b
	<i>Residual</i>	74.079	48	1.543		
	<i>Total</i>	338.000	49			

a. *Dependent Variable*: pembangunan daerah

b. Predictors: (*Constant*), penerapan manajemen strategi

Dari *output* tersebut diketahui bahwa nilai F hitung = 171.011 dan F tabel = 4,04 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel pembangunan daerah atau dengan kata lain ada pengaruh variabel Penerapan Manajemen Strategi (X) terhadap variabel Pembangunan Daerah (Y).

Tabel 4.15. *Coefficients*^a

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	<i>Sig.</i>
	B	<i>Std. Error</i>	Beta		
1 (<i>Constant</i>)	9.721	1.880		5.170	.000
penerapan manajemen strategi	.725	.055	.884	13.077	.000

a. *Dependent Variable*: pembangunan daerah

Diketahui nilai *Constant* (a) sebesar 9,721, sedang nilai Penerapan Manajemen Strategi (b / koefisien regresi) sebesar 0,725, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 9,721 + 0,725X$$

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan:

- a. Kostanta sebesar 9,721, mengandung arti bahwa nilai konsistem variabel pembangunan daerah adalah sebesar 9,721
- b. Koefisien regresi X sebesar 0,725 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Penerapan Manajemen Strategi, maka nilai Pembangunan Daerah bertambah sebesar 0,725. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif kuat.

1. Uji Parsial

Tabel 4.16. *Coefficients^a x1.1 terhadap Y*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24.618	2.686		9.165	.000
x1.1	1.067	.297	.461	3.595	.001

a. *Dependent Variable: y*

Dari *output* tersebut diketahui bahwa nilai signifikan pada x1.1 sebesar 0,000, artinya terdapat pengaruh antara x1.1 terhadap y.

Tabel 4.17. *Coefficients^a x1.2 terhadap Y*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.860	3.361		6.206	.000
x1.2	1.450	.364	.499	3.987	.000

a. *Dependent Variable: y*

Dari *output* tersebut diketahui bahwa nilai signifikan pada x1.2 sebesar 0,000, artinya terdapat pengaruh antara x1.2 terhadap y.

Tabel 4.18. *Coefficients*^a x1.3 terhadap Y

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.233	1.964		10.302	.000
	x1.3	1.647	.230	.719	7.175	.000

a. *Dependent Variable: y*

Dari *output* tersebut diketahui bahwa nilai signifikan pada x1.3 sebesar 0,000, artinya terdapat pengaruh antara x1.3 terhadap y.

Tabel 4.19. *Coefficients*^a x1.4 terhadap Y

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.998	1.313		20.566	.000
	x1.4	1.012	.180	.630	5.627	.000

a. *Dependent Variable: y*

Dari *output* tersebut diketahui bahwa nilai signifikan pada x1.4 sebesar 0,000, artinya terdapat pengaruh antara x1.4 terhadap y.

2. Interpretasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa penilaian kumulatif rata-rata responden atau tingkat penerapan manajemen strategi sebesar 50,25% responden yang memberikan pernyataan sangat setuju, menjadi bukti bahwa penerapan manajemen strategi di Kantor Bappeda Kabupaten Sinjai berjalan efektif dan penggunaan sumber daya digunakan dengan baik sehingga tujuannya berjalan sesuai yang diinginkan.

Penilaian kumulatif rata-rata responden atau tingkat pembangunan daerah sebesar 49,5% responden yang memberikan pernyataan sangat setuju, menjadi bukti bahwa Kantor Bappeda Kabupaten Sinjai dalam menjalankan

fungsi dan tugasnya sebagai badan koordinasi perencanaan pembangunan berjalan secara optimal.

Variabel penerapan manajemen strategi (X) berpengaruh terhadap variabel pembangunan daerah (Y) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai. Hal tersebut dapat di tunjukkan berdasarkan nilai Beta pada tabel *Coeffecient* sebesar 0,725. Jadi, hipotesis (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Dengan koefisien determinasi sebesar 78,14%. Artinya, jika semakin bagus penerapan manajemen strategi maka semakin efektif pula pembangunan daerah yang diberikan. Sedangkan sisahnya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 21,86% yaitu faktor kepemimpinan, lingkungan makro, budaya masyarakat, dan sebagainya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Penilaian kumulatif rata-rata responden atau tingkat penerapan manajemen strategi sebesar 50,25% responden yang memberikan pernyataan sangat setuju, menjadi bukti bahwa penerapan manajemen strategi di Kantor Bappeda Kabupaten Sinjai berjalan efektif dan penggunaan sumber daya digunakan dengan baik sehingga tujuannya berjalan sesuai yang diinginkan.

Penilaian kumulatif rata-rata responden atau tingkat pembangunan daerah sebesar 49,5% responden yang memberikan pernyataan sangat setuju, menjadi bukti bahwa Kantor Bappeda Kabupaten Sinjai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai badan koordinasi perencanaan pembangunan berjalan secara optimal.

Dan terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen. Hal ini dikuatkan dari hasil uji regresi linier sederhana dimana nilai Beta pada tabel *Coeffecient* sebesar 0,725 dikatakan tingkat kuat karena Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai efektif dalam menjalankan penerapan manajemen strategi sehingga fungsi dan tugas kantor bappeda sebagai badan koordinasi perencanaan pembangunan berjalan secara optimal. Nilai signifikan dari tabel *Coefesient* diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat diketahui bahwa variabel penerapan manajemen strategi berpengaruh terhadap pembangunan daerah dan hipotesis (H_0) ditolak dan (H_a) diterima. Dengan

koefisien determinasi sebesar 0,781. Dari perhitungan regresi dapat dilihat pengaruh variabel bebas (penerapan manajemen strategi) terhadap variabel terikat (pembangunan daerah) adalah 78,14%, sedangkan sisahnya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 21,86% yaitu faktor kepemimpinan, lingkungan makro, budaya masyarakat, dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka penelitian ini dapat memberikan contoh dan masukan bagi Kantor Bappeda lain tentang penerapan manajemen strategi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan cara menjalankan fungsi dan tugas Bappeda secara optimal sehingga tujuan dapat tercapai sesuai yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2008. *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Alejandro, Portes. 1976. *On the Sociology of National Development: Theories and Issues*. American Journal of Sociology.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Dennis L, Foster. 1999. *The Marketing Communication Process*, Mc. Grow Hull Inc. Kogakusha.
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Heene, Aime, dan Sebastian Desmidt. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Houthoofd, N. 2001. *Bedrijfsmanagement. Strategie, structuur en strijd*. Gent: Academica Press.
- Hunger, J.D. dan Wheelen, T.L. (2012). *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability (13th Edition)*. New York: Pearson.
- Kuncoro, Mudrajad (2006), *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Lemhanas. 1997. *Disiplin Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pearce, dan Robinson. 1997. *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- R, Jauch Lawrence dan Glueck William F. 1989. *Manajemen Dan Strategis Kebijakan Perusahaan*. Jakarta : Erlangga.
- Siagian, Sondang. P. 1994. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudjana. 2001. *Metode Statistik*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Tikson, Deddy T. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Sunyoto. 2008. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Viljoen, J. 1994. *Strategic Management: Planning and implementing successful and corporate strategies*. Melbourne: Longman.
- Wahyudi, Agustinus Sri. 1996. *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Strategik*. Jakarta Barat: Binarupa Aksara.

Internet:

- Sinjai Raih Terbaik II Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2018. Diakses dari www.situsresmiipemerintahkabupatensinjai.com pada tanggal 28 Juli 2018

Jurnal:

- Juwono, Onny. 2011. *Analisis Manajemen Strategik Perusahaan Waralaba (Franchise) (Studi Kasus di Restoran Cepat Saji McDonald`s)*, pada 05 Desember 2011 (<http://fe.budiluhur.ac.id/wp-content/uploads/2011/05/JURNAL-ANALISIS-MANAJEMEN-STRATEGIK-McDONALDS-Onny-Yuwono.pdf>).
- Anandita, Asteryna. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Donoyo Kota Malang, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 5.
- Mering, Fredrikus. 2015. Studi Tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 4.

Peraturan Pemerintah:

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*

L

A

M

P

I

R

A

N

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1.	Penerapan Manajemen Strategik (X)	1. <i>Environmental scanning</i> (Analisis lingkungan)	<ul style="list-style-type: none"> • Memonitor • Mengevaluasi • Menyebarkan informasi
		2. <i>Strategy formulation</i> (Formulasi strategi)	<ul style="list-style-type: none"> • Misi • Tujuan • Strategi • Kebijakan
		3. <i>Strategy implementation</i> (Implementasi strategi)	<ul style="list-style-type: none"> • Program • Anggaran • Prosedur
		4. <i>Evaluation and control</i> (Evaluasi dan control)	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal • Pengukuran kinerja • Pengambilan tindakan perbaikan
2.	Pembangunan Daerah (Y)	1. Struktur ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan ekonomi • Peningkatan per kapita • Perkembangan sektor industri • Perbaikan tingkat upah
		2. Indeks pembangunan manusia (<i>human development index</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Umur panjang dan sehat • Perolehan dan pengembangan pengetahuan • Peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik • Kualitas sumber daya manusia

KUESIONER

PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGIK TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

Nama :

Pekerjaan :

Berilah jawaban pernyataan berikut sesuai pendapat Anda, dengan cara memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia:

No	PERNYATAAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGI DAN PEMBANGUNAN DAERAH	INTERVAL JAWABAN				
		STS (sangat tidak setuju)	TS (tidak setuju)	RR (ragu- ragu)	S (setuju)	SS (sangat setuju)
	PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGI Analisis Lingkungan					
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai selalu memonitor hasil dari lingkungan baik <i>internal</i> maupun <i>eksternal</i>					
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai selalu mengevaluasi hasil dari lingkungan baik <i>internal</i> maupun <i>eksternal</i>					
	Formulasi Strategi					
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai melaksanakan misi organisasi dengan baik					

4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai melaksanakan tujuan organisasi dengan baik					
	Implementasi Strategi					
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai mengembangkan program dengan baik					
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai mengembangkan anggaran dengan baik					
	Evaluasi dan Kontrol					
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal dari hasil evaluasi dan control					
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai melakukan pengukuran kinerja dari hasil evaluasi dan control					
	PEMBANGUNAN DAERAH					
	Struktur Ekonomi					
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai melaksanakan pengembangan ekonomi agar struktur ekonomi berkembang terus					
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai melaksanakan peningkatan per kapita agar struktur ekonomi berkembang pesat					
11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai mengembangkan sektor industri untuk meningkatkan struktur ekonomi					
12.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai melakukan perbaikan tingkat upah untuk meningkatkan struktur ekonomi					
	Indeks Pembangunan Manusia					
11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai membangun alternatif dengan melihat umur panjang dan sehat agar pelaksanaan pembangunan daerah					

	berjalan lancar					
12.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai membangun alternatif dengan melihat perolehan dan pengembangan pengetahuan agar pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai yang diinginkan					
13.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai melaksanakan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kantor Bappeda Kabupaten Sinjai					
14.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai meningkatkan kualitas sumber daya agar terbukanya berbagai pilihan dan peluang dalam penentuan pelaksanaan pembangunan daerah					

Tabulasi Penerapan Manajemen Strategi

No Responden	Analisis Lingkungan		Formulasi Strategi		Implementasi Strategi		Evaluasi dan Kontrol		Jumlah
	1	2	1	2	1	2	1	2	
1.	5	4	5	2	4	5	3	5	33
2.	4	4	4	3	4	4	5	4	32
3.	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4.	4	5	5	5	4	4	5	5	37
5.	3	5	5	5	4	4	5	5	36
6.	4	5	5	4	4	4	5	4	35
7.	4	5	5	3	4	4	4	4	33
8.	5	3	3	2	5	5	5	5	33
9.	5	5	5	1	2	2	5	5	30
10.	4	5	5	1	5	5	5	4	34
11.	5	5	5	2	5	5	4	4	35
12.	5	5	5	3	5	5	5	5	38
13.	5	5	5	4	5	5	5	5	39
14.	4	5	5	5	5	5	5	4	38
15.	5	5	5	3	5	5	4	4	36
16.	5	5	5	4	5	5	5	5	39
17.	5	5	5	2	5	2	5	5	31
18.	5	5	5	5	3	3	5	5	36
19.	4	5	5	2	3	3	5	4	31
20.	5	5	5	3	1	1	4	4	28
21.	5	4	4	5	4	4	5	5	36
22.	3	3	3	4	4	4	4	5	30
23.	4	4	4	3	4	4	5	5	33
24.	5	3	3	2	4	4	4	5	30
25.	4	4	4	2	4	4	3	5	30

26.	3	3	3	3	4	4	3	5	28
27.	5	4	4	4	4	4	5	5	35
28.	4	3	3	5	4	4	5	5	33
29.	3	3	3	3	4	4	5	5	30
30.	3	5	5	2	4	4	5	5	33
31.	4	5	5	3	4	4	5	5	35
32.	5	5	5	3	5	5	5	5	38
33.	5	5	5	4	4	4	5	5	37
34.	5	5	5	5	3	3	5	5	36
35.	5	5	5	5	3	3	5	5	36
36.	5	5	5	4	3	3	5	5	35
37.	5	5	5	3	3	3	5	5	34
38.	5	5	5	2	3	3	3	5	31
39.	5	5	5	1	4	4	4	4	32
40.	5	5	5	2	3	3	3	4	30
41.	3	5	5	3	2	3	4	4	28
42.	3	5	5	4	4	4	4	4	33
43.	4	5	5	5	2	2	4	4	31
44.	4	5	5	2	2	2	4	4	28
45.	4	5	5	3	3	3	5	4	32
46.	4	5	5	4	5	5	5	4	37
47.	3	5	5	5	5	5	5	4	37
48.	5	5	5	4	5	5	5	5	39
49.	5	5	5	3	5	5	4	5	37
50.	5	5	5	2	5	5	5	5	37

Tabulasi Pembangunan Daerah

No Responden	Struktur Ekonomi				Indeks Pembangunan Manusia				Jumlah
	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	2	4	5	5	4	4	5	5	34
2.	3	2	5	5	4	4	5	5	33
3.	4	4	4	4	5	5	4	4	34
4.	5	4	4	4	4	5	4	5	35
5.	5	4	5	5	4	4	4	4	35
6.	4	3	5	5	4	4	5	5	35
7.	3	4	4	4	5	5	4	5	34
8.	2	4	4	4	4	5	5	5	33
9.	1	4	4	5	4	4	5	5	32
10.	1	4	5	5	5	5	5	5	35
11.	2	4	5	5	5	5	5	4	35
12.	3	5	5	5	5	5	5	5	38
13.	4	4	5	5	4	5	5	5	37
14.	5	3	5	5	5	5	5	5	38
15.	3	4	5	5	5	5	4	4	35
16.	4	5	5	5	5	5	5	5	39
17.	2	4	4	4	4	5	4	4	31
18.	5	4	5	5	4	4	4	4	35
19.	2	2	5	5	3	4	5	5	31
20.	3	4	5	4	5	5	4	4	34
21.	5	4	4	4	4	5	5	5	36
22.	4	5	4	3	3	5	3	3	30
23.	3	5	5	4	3	5	4	4	33
24.	2	5	5	5	3	5	5	4	34
25.	2	5	3	4	3	5	4	4	30

Pearson Correlation	.340*	.373**	.580**	.258	.373**	.665**	.463**	.665**	1
Jumlah Sig. (2-tailed)	.016	.008	.000	.071	.008	.000	.001	.000	
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil uji Reliabilitas manajemen strategi

Case Processing Summary

	N	%
Valid	50	100.0
Cases Excluded ^a	0	.0
Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.750	8

Hasil uji validitas pembangunan daerah

Correlations

		Item01	Item02	Item03	Item04	Jumlah
Item01	Pearson Correlation	1	.180	.076	.062	.635**
	Sig. (2-tailed)		.210	.601	.667	.000
	N	50	50	50	50	50
Item02	Pearson Correlation	.180	1	.009	.583**	.695**
	Sig. (2-tailed)	.210		.952	.000	.000
	N	50	50	50	50	50
Item03	Pearson Correlation	.076	.009	1	.307*	.463**
	Sig. (2-tailed)	.601	.952		.030	.001
	N	50	50	50	50	50
Item04	Pearson Correlation	.062	.583**	.307*	1	.692**
	Sig. (2-tailed)	.667	.000	.030		.000
	N	50	50	50	50	50
Jumlah	Pearson Correlation	.635**	.695**	.463**	.692**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	
	N	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji reliabilitas pelaksanaan pembangunan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.741	4

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Variables Entered/Removed^a

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Manajemen Strategik ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Pembangunan

b. All requested variables entered.

Model Summary

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.884 ^a	.781	.776	1.24230

a. Predictors: (Constant), Manajemen Strategik

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	263.921	1	263.921	171.011	.000 ^b
	Residual	74.079	48	1.543		
	Total	338.000	49			

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Pembangunan

b. Predictors: (Constant), Manajemen Strategik

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.721	1.880		5.170	.000
1 Manajemen Strategik	.725	.055	.884	13.077	.000

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Pembangunan

Gambar 1



Gambar 1 Pegawai mengisi kuesioner

Gambar 2



Gambar 2 Pegawai mengisi kuesioner

Gambar 3



Gambar 3 Pegawai mengisi kuesioner

Gambar 4



Gambar 4 Pegawai mengisi kuesioner

Gambar 5



Gambar 5 Pegawai mengisi kuesioner

Gambar 6



Gambar 6 Pegawai mengisi kuesioner

Gambar 7



Gambar 7 Meminta data yang berkaitan Pelaksanaan pembangunan daerah

Gambar 8



Gambar 8 Sedang mencari data-data pembangunan daerah

RIWAYAT HIDUP



Hardiyanti Sri Ningsi, lahir di Sinjai Tengah pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 1996, anak pertama dari dua bersaudara, anak dari pasangan suami istri **Muhksin dan Hasmina**. akrab disapa Dian, memulai pendidikannya dengan memasuki jenjang pendidikan formal di SDN 112

Sattulu Sinjai Tengah, selesai pada tahun 2008 dan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya SMP Negeri 1 Sinjai Tengah dan selesai pada tahun 2011. Pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sinjai Tengah, selama 3 tahun dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara.